

## **SEGREGASI KEHIDUPAN PEMUKIMAN KOTA PALOPO DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESERASIAN SOSIAL**

**PAT. BADRUN**

### **Abstrak**

*Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara, data kemudian dianalisis dengan pendekatan SWOT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi bentuk dan jenis pola segregasi pemukiman kota, untuk mengetahui dampak dari pola pemukiman segregatif terhadap keserasian social dan kehidupan beragama penduduk setempat, dan untuk mengetahui pola-pola adaptasi atau upaya penanganan yang dilakukan, baik dalam usaha meredam potensi konflik akibat pemukiman segregatif maupun untuk menemukan solusi terhadap konflik sosial yang telah terjadi. Lokasi penelitian ini adalah kota Palopo.*

*Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dinamika kota Palopo beberapa dasawarsa terakhir memunculkan segregasi pemukiman yang cenderung berpola: (1) pola segregasi etnis; (2) pola segregasi okupasi; (3) pola segregasi status sosial, dan (4) pola segregasi agama. Keempat pola segregasi pemukiman yang diidentifikasi tersebut memberikan dampak bagi kehidupan penduduk kota, baik dampak lingkungan berupa rendahnya rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan maupun dampak sosial berupa berupa kesenjangan, keresahan, dan kerawanan sosial*

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan kota-kota Indonesia, terutama kota-kota lama, setelah kemerdekaan menunjukkan pertumbuhan yang cepat baik penduduknya maupun pemukiman serta saran dan pra sarana pendukungnya. Akan tetapi gambaran pertumbuhan kota-kota di Indonesia, menggambarkan wajah kota-kota lama masih mengesankan pola warisan kolonial dengan "wajah bermuka dua". Pusat kota merupakan wilayah pemukiman elite

pemerintahan dan pusat perdagangan sedang kawasan pinggiran kota yang melingkari pemukiman elite pemerintahan dan pusat perdagangan adalah pemukiman masyarakat biasa. Pada masa pemerintahan penjajah kolonial Belanda, pusat kota merupakan pemukiman elite pemerintahan kolonial Belanda dan pusat perdagangan yang dihuni oleh keturunan Cina, Arab, dan Timur Asing, sedang kawasan pinggiran kota dihuni oleh masyarakat bumiputera. Kedua kawasan pemukiman memperlihatkan struktur dan konstruksi pemukiman yang berbeda; yang satu merepresentasikan gaya hidup urban atau perkotaan, sedang yang lain bergaya hidup *rural* atau pedesaan.

Dalam pertumbuhan kota lebih lanjut, kawasan pinggiran kota telah menyerap pendatang dan perantau yang berasal dari berbagai kawasan sub-budaya nusantara, mengalir ke kota melalui saluran famili, kerabat, dan teman sekampung. Maka perkampungan pinggiran kota itu tumbuh menjadi kelompok-kelompok pemukiman etnis yang semakin lama semakin padat dan melebar serta semakin tinggi tingkat homogenitas identitas etnisnya. Sementara itu wajah pusat kota juga mengalami perubahan sejalan dengan pertumbuhan okupasi modern di sektor jasa, dagang, dan industri dengan semakin tumbuhnya pemukiman elit birokrasi dan bisnis yang memunculkan rumah-rumah mewah dan gedung-gedung bertingkat serta perluasan zona perdagangan dan pemukiman baru, baik yang dikelola oleh perusahaan pengembang maupun pemerintah dalam bentuk kompleks-kompleks perumahan.

Pola pertumbuhan kota seperti dikemukakan di atas pada gilirannya mengakibatkan polarisasi kehidupan pemukiman dalam berbagai bentuk dan jenisnya: etnis, strata sosial, okupasi dan juga agama. Segregasi pemukiman yang demikian itu memiliki atau membawa dampak polarisasi karakteristik budaya atau sub-budaya yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menyimpan potensi konflik antar penduduk. Oleh karena itu maka penelitian mengenai perkembangan pemukiman dan dampaknya terhadap kehidupan sosial keagamaan masyarakat menjadi penting untuk diangkat sebagai topik penelitian, sebagai langkah awal bagi suatu penelitian yang lebih komprehensif dalam paket penelitian mengenai integrasi dan keserasian sosial.

## **B. Masalah Penelitian**

Fokus penelitian tentang segregasi pemukiman ini adalah pola segregasi pemukiman di perkotaan dan dampaknya terhadap keserasian sosial. Dalam konteks ini, pertanyaan penelitian yang perlu dijawab adalah: *pertama*, bagaimana pola segregasi pemukiman di kota-kota yang diamati, baik antara satu kompleks pemukiman lain yang segregatif, antara satu kompleks pemukiman dengan perumahan penduduk di sekitarnya, maupun antara satu pemukiman etnis dengan pemukiman etnis lain atau penduduk sekitarnya yang berasal dari etnis atau sub-etnis lainnya; demikian pula dalam satu pemukiman yang didominasi oleh pemeluk agama tertentu dengan pemeluk agama lainnya. *Kedua*, bagaimana dampak dari pola segregasi pemukiman tersebut terhadap keserasian sosial dan kehidupan beragama dalam masyarakat yang bersangkutan. *Ketiga*, bagaimana pola adaptasi atau upaya penanganan yang dilakukan, baik untuk meredam potensi konflik akibat pemukiman segregatif maupun untuk menemukan solusi terhadap konflik sosial yang terjadi.

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mengidentifikasi bentuk dan jenis pola segregasi pemukiman kota yang diteliti.
2. Mengetahui dampak dari pola pemukiman segregatif terhadap keserasian sosial dan kehidupan beragama penduduk setempat.
3. Mengetahui pola-pola adaptasi atau upaya penanganan yang dilakukan, baik dalam usaha meredam potensi konflik akibat pemukiman segregatif maupun untuk menemukan solusi terhadap konflik sosial yang telah terjadi.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya dan mengembangkan fenomena-fenomena sosial khususnya bidang sosiologi dan lebih khusus pada sosiologi perkotaan. Selain itu diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pengambilan kebijaksanaan di bidang terkait, seperti bidang Tata Ruang Kota (instansi Pemda setempat), Departemen Agama serta instansi/ lembaga terkait lainnya dengan upaya penciptaan stabilitas sosial dan penanganan konflik sosial, termasuk konflik antarpemeluk agama dan konflik antaretnik

## D. Tinjauan Pustaka

Pertumbuhan kota-kota di Indonesia telah menampilkan gambaran mobilitas sosial yang unik. Perpindahan penduduk ke kota (urbanisasi) yang berasal dari kawasan budaya etnis dan tingkat sosial-ekonomi yang berbeda pada gilirannya memunculkan suatu masyarakat kota yang majemuk.

Menurut Pelly (dalam Harsya, 1988:421) kemajemukan masyarakat kota pada satu segi dapat membuka kesempatan untuk saling mengenal berbagai latar belakang perbedaan masing-masing, saling memotivasi satu sama lain, saling bertukar informasi dan pengetahuan serta kearifan yang pada gilirannya menjadikan masyarakat tersebut lebih dinamis dan terbuka. Namun dari segi lain, masing-masing komponen masyarakat kota yang berbeda latar belakang itu memerlukan kemampuan penyesuaian diri satu sama lain untuk dapat membina keserasian sosial.

Menurut Elisabeth (Ever, 1982) bahwa struktur-struktur yang terpisah-pisah dengan ciri-ciri hubungan sosial yang khas. Struktur kota besar yang luas itu muncul dengan prinsip keteraturan dan integrasi nyata, yang dengan menelusuri landasan struktur kekeluargaan menunjukkan juga sifat-sifat heterogen dari golongan etnis, deferensi pekerjaan, kriminalitas dan bentuk ekonomi.

Para penganut Mazhab Chicago mengembangkan tiga model dasar tentang perkembangan perkotaan. Pertama adalah **'teori lingkaran konsentrasi'**. Ia menyatakan bahwa wilayah-wilayah sosial dengan ciri-ciri sosial dan ekonomi kota tersusun menyerupai bentuk lingkaran bertingkat yang mengelilingi pusat. Variabel-variabel untuk mengukur ciri secara sistematis ini dengan struktur harga tanah; semakin dekat tanah dari pusat kota semakin mahal harganya, semakin jauh dari pusat kota menjadi semakin murah. Kedua ialah "**model sektor**" merupakan pola-pola pewilayahan pemukiman dengan karakteristik status sosial. Variabel jenis pekerjaan dan kepemilikan kasta yang menjadi alat ukur secara sistemik membentuk pemukiman berkelompok dan terpisah. Ada pemukiman nelayan, pemukiman karyawan, perumahan-perumahan elite berkembang, disamping itu terdapat pula pemukiman-pemukiman kumuh. Semua itu membentuk pemukiman-pemukiman secara komunal yang terpisah-pisah. Dan ketiga adalah **model inti**. Model ini menjadikan perbedaan etnik sebagai variabel ukuran. Pemukiman cenderung terbentuk berdasarkan etnik. Terdapat pemukiman menurut etnik tertentu, di mana pemukiman tersebut

memiliki seperangkat karakteristik sosial budaya, antara lain sosial, ekonomi, politik, adat istiadat dan agama masing-masing.

Para sosiolog memandang betapa pentingnya pengetahuan tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara individu dengan kelompok manusia.

Bentuk umum interaksi sosial ada empat yaitu kerjasama, persaingan, akomodasi dan konflik (Soekanto, 2002:61). Namun Gillin pernah mengadakan penggolongan yang lebih luas lagi. Menurutnya ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Proses yang pertama dapat dibagi kepada tiga bentuk khusus yaitu akomodasi, asimilasi dan akulturasi, sedangkan proses yang kedua mencakup persaingan dan pertikaian (Soekanto, 2002).

Istilah *community* atau komunitas dapat diartikan sebagai masyarakat setempat. Istilah mana menunjukkan pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa (Soekanto, 2002). Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tersebut disebut masyarakat.

Komunitas dapat berupa masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan sering disebut juga dengan *urban community* (Soekanto, 2002). Pengertian masyarakat perkotaan lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupan masyarakatnya serta ciri-ciri kehidupannya. Masyarakat perkotaan cenderung berfikir rasional dalam menanggapi realitas kehidupan. Selain itu mereka hidup dalam lingkungan ekonomi dan perdagangan yang individualistik. Cara hidupnya mempunyai kecenderungan ke arah materialistik. lain itu pembagian kerja sangat tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata diperkotaan (Soekanto, 2002).

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat studilcasus, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, FGD (*Focus Group Discussion*), studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sumber data dan informasi ialah pemerintah daerah

setempat, pejabat formal terkait, para pengembang, informan dari masyarakat yang dipilih secara purposif. Sedangkan lokasi penelitian adalah kota Palopo, Sulawesi Selatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan interpretative naratif.

## **II. TEMUAN DAN DISKUSI**

Kota Palopo merupakan salah satu kota tua di daerah Sulawesi Selatan. Ketika pemerintahan kolonial Belanda berkuasa, pusat pemerintahan dibangun di sebelah Barat istana raja, dikelilingi oleh perumahan pejabat kolonial. Palopo sejak menjadi pusat kerajaan, secara berangsur dihuni oleh orang-orang yang berasal dari berbagai etnik dan agama. Menurut Morris (1988), bahwa penduduk Palopo saat itu terbanyak dari etnik Bugis (Bugis Ware') dan Toraja. Namun perkembangan selanjutnya penduduk Kota Palopo mulai didatangi orang yang berasal dari Poso dan Mengkoka di Kolaka.

Penataan pemukiman Kota Palopo sejak awal terbentuknya menganut pola sentries. Istana raja berada di tengah-tengah, dikelilingi oleh rumah pejabat kerajaan. Kemudian perumahan masyarakat biasa (disebut To Ware) yang sebagian besar tersebar di sebelah Timur istana raja. Pasar, dalam arti sebagai tempat saling tukar menukar barang barang kebutuhan berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat biasa.

Ketika pemerintah Belanda berkuasa, pola sentries tetap dianut, namun diperluas serta dipertegas batas-batasnya. Kantor pusat pemerintahan kolonial dibangun di sebelah Barat istana raja, dikelilingi oleh perumahan pejabat kolonial. Rumah ibadah, selain sebuah masjid yang dibangun pada tahun 1604 oleh pemerintah Kerajaan Luwu, dibangun pula oleh pemerintah kolonial sebuah gereja di pinggir alun-alun yang kemudian dijadikan lapangan olah raga. Di sebelah utara kantor pusat pemerintahan, dibangun pasar dan rumah-rumah toko yang sebagian besar dihuni oleh keturunan Cina, Arab, dan India.

Dengan demikian, pemisahan/pengelompokan pemukiman atau segregasi berdasarkan perbedaan status sosial tampaknya telah diletakkan dasar-dasarnya sejak masa pemerintahan Belanda. Hanya saja, segregasi pemukiman penduduk pada kedua sistem dan masa pemerintahan tersebut relatif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap relasi sosial. Ketaatan

masyarakat pada masa kerajaan yang dilandasi kesetiaan terhadap peraturan dan sistem kerajaan mampu mengeliminasi potensi konflik atau gejolak sosial yang diakibatkan oleh perbedaan kehidupan yang segregatif. Demikian juga pada masa penjajahan kolonial, kepatuhan masyarakat (yang didorong oleh rasa ketakutan) terhadap penjajah mampu meredam gejolak sosial yang diakibatkan oleh segregasi kehidupan terutama antara elite penjajah (dan keluarganya) dengan masyarakat bumiputera. Selain itu, kedua sistem pemerintahan menerapkan secara konsekuensi dan konsisten semua peraturan dan ketentuan yang berlaku (*law enforcement*).

Sampai pada masa kemerdekaan dan perkembangan kemudian selama empat atau lima dekade pasca kemerdekaan, pertumbuhan kota Palopo mengalami perubahan dan perluasan. Lokasi pemukiman cenderung tumbuh mengikuti pola linear mengikuti jalur jalanan induk. Perumahan berkembang mengikuti keinginan penduduk yang setiap tahun menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi (rata-rata 2,5 %) tanpa adanya suatu program perencanaan umum tata ruang kota yang baku sebagai dasar acuan. Akibat dari perkembangan kota dan pertumbuhan pemukiman demikian itu memunculkan pola pemukiman segregatif. Setidaknya ada empat pola perkembangan pemukiman segregatif yang dapat diidentifikasi dalam perkembangan kota Palopo selama ini, yaitu:

*Pertama*, perkembangan pemukiman ke arah pantai yang banyak dihuni oleh para nelayan, *Kedua*, perkembangan pemukiman mengikuti jalur jalan ke Tana Toraja, yang banyak dihuni oleh orang yang berasal dari daerah Kabupaten Tana Toraja. *Ketiga*<sup>^</sup>, perkembangan pemukiman yang dibangun PERUMNAS yang banyak dihuni oleh pegawai negeri dan lain-lain golongan ekonomi menengah ke bawah. *Keempat*<sup>^</sup> perkembangan pemukiman di pusat kota dan sekitarnya yang banyak dihuni oleh penduduk asli dan/atau pendatang yang memiliki status ekonomi dan sosial yang memadai (golongan menengah ke atas).

Pola pertama, yakni perkembangan pemukiman ke arah pantai, cenderung menunjukkan pemukiman segregatif etnis dan okupasi. Pemukiman tersebut didominasi oleh kelompok okupasi atau pekerjaan/mata pencaharian tertentu yakni nelayan, dengan latar belakang etnis atau subetnis yang berbeda yakni etnis Bugis Luwu dengan berbagai sub etnisnya dan etnis Bugis pendatang baru. Perkembangan pemukiman nelayan tepatnya berada di bagian Timur Kota Palopo. Pemukiman tersebut masih termasuk dalam wilayah kecamatan kota yaitu Kecamatan Wara. Lokasi

pemukiman tersebut tepatnya berada di Kelurahan Amassangeng dan Kalurahan Pontip (BPS Kota Palopo, 2002).

Pola kedua, yakni pemukiman yang berkembang mengikuti jalur jalan ke Tana Toraja, cenderung menunjukkan pola perkembangan pemukiman berdasarkan etnis, yakni etnik Toraja dengan mata pencaharian selaku petani.

Pola ketiga, yakni pemukiman yang dibangun PERUMNAS, cenderung menunjukkan pola perkembangan pemukiman berdasarkan okupasi atau mata pencaharian, yakni sebagian besar pegawai negeri, dengan kelas sosial menengah ke bawah.

Pola keempat, yakni pemukiman di pusat kota dan sekitarnya, cenderung menunjukkan pola perkembangan pemukiman berdasarkan kelas sosial tertentu (kelas menengah ke atas).

#### **A. Dampak Segregasi Pemukiman terhadap Keserasian Kehidupan Masyarakat**

Sebagaimana diungkapkan pada pembahasan terdahulu bahwa perkembangan pemukiman di kawasan pantai yang banyak dihuni oleh para nelayan. Pemukiman kawasan pantai sebagian besar penghuninya adalah nelayan (kesamaan okupasi/pekerjaan), namun mereka berasal dari dua kelompok etnis. Pertama, etnis penduduk asli (Bugis Luwu) dan lainnya adalah etnis yang berasal dari daerah-daerah Bugis yang berdekatan dengan daerah Luwu, seperti Sidrap, Bone, Wajo, dan lain-lain. Kedua kelompok etnis berbeda spesifikasi pekerjaan sebagai nelayan. Penduduk etnik asli lebih menggeluti nelayan pencari ikan lepas sedangkan etnis Bugis pendatang lebih menekuni propesi nelayan domestik.

Kondisi perkembangan pemukiman yang terjadi di wilayah pantai, tampak belum menimbulkan dampak yang berarti terhadap hubungan sosial masyarakat. Kontak personal antara warga masih intensif. Saling mengenal dan menyapa antar warga masih sering terjadi. Bahkan kerjasama ekonomi pun terjalin, yaitu saling menjualkan hasil tangkapan ikan di laut. Akan tetapi situasi pemukiman yang didukung dengan kondisi rumah panggung dan sebagian berbentuk "gubuk" dan keberadaannya tidak didasarkan pada aturan penataan pemukiman yang standar, memperendah rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Pencemaran lingkungan pemukiman seperti pembuangan sampah, genangan air selokan, telihat jelas di mana-

mana yang mengesankan keadaan pemukiman kumuh. Selain itu, penerangan lampu yang masih sangat terbatas pada malam hari memberikan peluang dan rangsangan timbulnya kerawanan sosial.

Pemukiman sepanjang jalur jalan ke Tana Toraja mulai dari Kelurahan Boting, di samping dihuni penduduk asli juga dihuni oleh pendatang baru dari daerah Tana Toraja. Pengelompokan (walaupun dalam kelompok-kelompok kecil) antara pemukiman penduduk asli dengan pemukiman penduduk pendatang pada gilirannya menimbulkan pola pemukiman yang bersifat etnis bahkan agama.

Penduduk pendatang dari Tana Toraja memiliki kebiasaan memelihara ternak babi di pekarangan rumah masing-masing dan kebiasaan itu diberlakukan pula pada pemukiman baru mereka. Namun penduduk asli mengeluhkan dan mempersoalkan cara domestifikasi/pemeliharaan ternak tersebut yang kurang mengindahkan kebersihan dan keserasian lingkungan. Kotoran hewan ternak babi tersebut menimbulkan bau yang dianggap "sangat mengganggu" rasa penciuman penduduk asli setempat, sementara masalah kebersihan lokasi kandang pemeliharaan hewan tersebut kurang diindahkan, sehingga dianggap menganggu dan mencemari lingkungan fisik pemukiman. Selain itu limbah dan air pencucian limbah kotoran hewan ternak babi tersebut, dialirkan ke sungai, yang dalam perjalanan menuju pusat kota, air sungai tersebut digunakan penduduk asli untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan mengambil air wudhu karena itu penduduk asli yang berada dipemukiman tersebut, demikian pula penduduk yang berada sepanjang aliran sungai yang tercemar itu, menganggap bahwa upaya pemeliharaan hewan ternak babi tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan yang cukup serius, baik lingkungan fisik, lingkungan sosial, maupun lingkungan kepercayaan/keyakinan.

Dari uraian tersebut di atas, tampak ada ketegangan sosial. Keadaan semacam itu menyimpan potensi konflik. Terdapat suatu ketegangan sosial yang diakibatkan oleh perbedaan budaya (kebiasaan-kebiasaan). Penduduk asli Palopo yang mayoritas menganut agama Islam memiliki pemahaman keyakinan keagamaan prihal mengkonsumsi suatu jenis ternak dan minuman, sedangkan penduduk migran Toraja pun memiliki keyakinan keagamaan yang kontradiktif dengan kebiasaan yang telah berkembang sejak lama di Kota Palopo. Situasi budaya yang kontradiktif yang dianut oleh komunitas berbeda yang berdampingan semacam itu sudah dapat

dikategorikan sebagai konflik laten yang sewaktu-waktu dapat terjadi bila pemicunya muncul.

Pemukiman Perumnas yang tumbuh menjamur di Kota Palopo di satu segi memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya membantu masyarakat penduduk Kota Palopo mengatasi masalah keterbatasan perumahan. Namun demikian, pembangunan Perumnas yang belum didasarkan pada suatu program Rencana Umum Tata Ruang Kota, menimbulkan beberapa implikasi dalam kaitan dengan keserasian kehidupan pemukiman di kota Palopo.

Pemukiman Perumnas pertama dibangun di Balandai, semula diperuntukkan bagi mereka yang menghuni lokasi kumuh dekat pusat kota yang lebih dikenal dengan sebutan "Kampung Pisang". Penghuni yang dipindahkan ke Perumnas sebagian diantaranya adalah PSK (pekerja seks komersil). Di tempat pemukiman baru, sebagian di antara mereka walaupun telah mendapatkan pembinaan, masih tetap meneruskan profesi mereka dan sedikit banyak mempengaruhi masyarakat sekitar terutama para generasi muda. Sementara itu, ada kelurahan yang menampung sampai enam lokasi Perumnas yaitu Kelurahan Surutanga, sehingga tingkat kepadatan penduduk naik secara drastis, sementara letak lokasi perumahan tidak beraturan, baik dari segi jarak maupun posisi masing-masing terhadap suatu pola tata ruang pemukiman standar.

Pencemaran lingkungan, seperti pembuangan sampah, genangan air selokan, tampaknya belum mendapat perhatian dari para pemukim lokasi Perumnas pada umumnya. Hal ini sangat tampak pada daerah-daerah "antara" (*border-line*) dari lokasi-lokasi pemukiman yang berdekatan, sehingga daerah ini menanggung beban lingkungan yang melampaui daya dukungnya. Daerah-daerah tersebut juga potensial memunculkan kerawanan-kerawanan sosial seperti penodongan, perampukan, penjambretan.

Di pemukiman pusat Kota Palopo, gedung-gedung baru yang bermunculan seperti hotel, rumah-rumah elit (menurut ukuran setempat) dan gedung perkantoran, di samping perumahan penduduk yang sebagian masih berbentuk rumah panggung. Juga terdapat kompleks perumahan (asrama) TNI dan Polri. Di pemukiman pusat kota tersebut, tidak jelas adanya keterpisahan pemukiman secara berkelompok dan tidak terlihat adanya rumah-rumah kumuh. Namun demikian, sebagai akibat dari pembangunan gedung dan rumah-rumah yang belum didasarkan pada tata

ruang kota yang telah diprogramkan maka letak bangunan mengesankan kesemrawutan. Ada bagian tertentu dari pemukiman tersebut yang memiliki beban lingkungan yang tinggi sehingga menimbulkan pencemaran seperti pembuangan sampah dan genangan air selokan serta kebersihan lingkungan pemukiman kurang terindahkan. Hal ini tampak jelas bila musim penghujan datang yang biasanya disertai dengan banjir.

## **B. Upaya Pengelolaan Dampak Segregasi Pemukiman**

Upaya meletakkan dasar pembangunan Kota Palopo secara menyeluruh dalam suatu rencana umum tata kota telah dirintis pada pertengahan dekade 90-an dengan tersusunnya program RTURK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) untuk Kotif Palopo. Namun demikian, realisasi rencana tersebut mengalami hambatan baik karena faktor-faktor ekstern maupun pengaruh faktor-faktor intern. Faktor-faktor ekstern misalnya krisis ekonomi dan moneter nasional, krisis kepemimpinan nasional ekses-ekses negatif dari keterbukaan era reformasi, dan konflik-konflik sosial di berbagai daerah. Faktor-faktor intern misalnya konflik-konflik sosial di daerah Luwu sendiri, pemekaran Kabupaten Luwu menjadi tiga Kabupaten (Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur) serta perubahan status Kotif Palopo ke Kota Palopo. Oleh karena itu, upaya penanganan masalah pembangunan kota selama ini, termasuk dampak negatif dari segregasi pemukiman, tetap dilakukan oleh pihak yang terkait secara sektoral dan fungsional dan dengan teknik penanganan secara konvensional.

Khusus mengenai masalah-masalah sosial, baik yang terjadi sebagai dampak negatif dari sistem segregasi pemukiman maupun yang timbul akibat dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi, terutama yang mengkristal dalam bentuk penyakit sosial (patologi sosial), selain dilakukan oleh pihak terkait secara sektoral dan fungsional, pemerintah daerah bersama dengan pejabat instansi terkait serta tokoh masyarakat dan tokoh agama telah melakukan upaya-upaya ekstra secara terpadu, sejak awal tahun 2000. Terakhir pada bulan Maret 2002 berhasil dibentuk wadah kerjasama antara semua komponen yang terkait dan bertanggungjawab untuk menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi secara berangsur penyakit-penyakit sosial yang melanda Kota Palopo terutama kalangan usia remaja dan anak-anak. Wadah kerja sama yang dimaksud diberi nama Badan Koordinasi Operasional Pengendalian dan Penanggulangan Patologi Sosial (disingkat BOP3S). Penyakit masyarakat yang diidentifikasi dan dijadikan sasaran

operasional ialah: (1) minuman keras, (2) perjudian dalam segala bentuknya, (3) penyalahgunaan obat terlarang, narkotika, dan zat aditif lainnya, (4) praktik prostitusi, dan (5) pengedaran VCD porno.

Namun demikian, sampai akhir tahun 2002, badan khusus yang dibentuk ini tampaknya belum dapat melakukan misi operasional secara lancar dan efektif. Agaknya terdapat indikasi aparat tertentu yang terlibat dalam badan tersebut kurang serius menangani kasus patologi sosial yang muncul. Bahkan terkadang ditemukan indikasi adanya oknum-oknum aparat yang 'melindungi' berlangsungnya kegiatan-kegiatan tersebut.

### **C. Evaluasi**

Telah dikemukakan secara singkat tiga temuan pokok penelitian, yakni: (1) bentuk dan pola segregasi pemukiman di Kota Palopo; (2) dampak segregasi pemukiman tersebut terhadap keserasian hidup masyarakat; dan (3) upaya pengelolaan dampak segregasi pemukiman tersebut.

Ketiga temuan ini akan dijelaskan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (*SWOTAnalysis*):

#### **1. *Strength* (Kekuatan)**

Kota Palopo memiliki sejumlah kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan perkotaan yang tertata secara baik, dapat menghasilkan tingkat perekonomian yang lebih produktif, serta mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih layak. Kemampuan dan potensi yang dimiliki itu, antara lain:

- a. Kota Palopo merupakan bagian dari Tanah Luwu yang mempunyai sumber alam yang potensial untuk dikelola lebih lanjut, baik komoditi perdagangan maupun produksi pertanian. Salah satu faktor utama bagi kemampuan pengembangan kehidupan kota adalah faktor perkembangan kegiatan usaha apalagi bila didukung dengan ketersediaan potensi sumber daya alam.
- b. Dalam konstalasi pembangunan regional Sulawesi Selatan sejak pertengahan tahun 90-an, Kota Palopo ditetapkan sebagai pusat pengembangan wilayah Kabupaten Luwu dan sebagai kota orde II wilayah pengembangan III Sulawesi Selatan (sebelum dimekarkan). Dengan beberapa fungsinya yang menonjol seperti antara lain sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Dengan demikian,

Kota Palopo dapat memberikan andil dalam usaha memperluas penyediaan lapangan kerja, meningkatkan kualitas penduduk, dan peningkatan pelayanan kota.

- c. Kota Palopo memiliki kelengkapan fasilitas sosial ekonomi seperti pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pasar dan pertokoan, serta fasilitas pendidikan yang memadai.
- d. Kota Palopo memiliki sarana perhubungan yang relatif lengkap seperti seperti pelabuhan Tanjung Ringgit, dan terminal, serta berada di jalur Trans Sulawesi.
- e. Dalam wilayah administrasi Kota Palopo masih terdapat lahan berkemampuan relatif besar untuk kegiatan pembangunan fisik kota dengan luas areal yang mampu menampung kegiatan perkotaan hingga akhir dekade ini. Sebagian lahan tersebut dewasa ini masih berupa persawahan, ladang, dan tanah kosong.
- f. Kota Palopo memiliki keindahan alam (terutama di sekitar wilayah pengaruh Kota Palopo) yang memberikan harapan untuk dikembangkan menjadi pusat pelayanan pariwisata, serta dapat berperan sebagai kota transit.
- g. Suasana kehidupan sosial masyarakatnya yang secara umum masih mengindahkan pranata sosial serta adat istiadat.
- h. Perubahan status wilayah administrasi dari Kotif Palopo menjadi Kota Palopo setingkat kabupaten pada pertengahan tahun 2002, memberikan peluang pengembangan potensi kota lebih lanjut secara optimal.
- i. Rencana Umum Tata Ruang Kota Palopo yang pernah disusun, merupakan acuan untuk perencanaan pengembangan dan penataan Kota Palopo ke depan. Demikian pula halnya, lembaga kerjasama masyarakat yang pernah dibentuk dalam upaya pengelolaan dan penanggulangan masalah-masalah sosial, dapat menjadi acuan ke depan untuk menangani masalah-masalah yang sama.

## **2. Weakness (Kelemahan).**

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pejabat formal yang terkait, tokoh agama, serta menyimak program-program yang ada, maka beberapa hal yang selama ini dipandang sebagai kelemahan yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program, antara lain:

Usaha-usaha yang berkaitan dengan proses produksi untuk peningkatan nilai tambah hasil produksi perkebunan dan kehutanan masih lemah. Kegiatan perekonomian masih berskala lokal dan kegiatan perdagangan masih terbatas.

Kelengkapan fasilitas sosial Kota Palopo sehubungan dengan perannya sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi masih belum mencukupi, terutama untuk pelayanan pendidikan tingkat lanjutan atas, reaksi terbuka serta fasilitas pelayanan sosial, ekonomi dan perdagangan grosir.

Kondisi fisik dasar hanya sebagian saja yang mampu menampung dan menunjang perkembangan kota, di samping sebagian lahan di sepanjang pinggiran sungai di pusat kota merupakan rawa-rawa.

Bentuk Kota Palopo yang cenderung mengalami pergeseran dari pola perkembangan konsentris menjadi pola linier berkembang mengikuti jalur trans Sulawesi. Kondisi ini kurang menguntungkan di dalam pelayanan fasilitas kota jika tidak ditunjang dengan jalan alternatif/jalan lingkungan yang masih terbatas.

Terjadinya pembauran fungsi penggunaan lahan seperti kegiatan industri di kawasan pelabuhan, pencampuran kegiatan perdagangan eceran dan grosir, kegiatan pendidikan bercampur dengan fasilitas hiburan (bioskop), serta perluasan pemukiman ke kawasan Amassangan dan Boting yang berawa-rawa dan selalu mengalami banjir rutin setiap musim hujan.

Pertambahan penduduk kota yang mencapai 2,5% petahun yang diikuti dengan peningkatan kegiatan penduduk yang menyebabkan bertambahnya beban kota dan menurunnya kualitas kota, seperti peningkatan volume sampah limbah industri rumah tangga yang mencemari lingkungan, penurunan kualitas air permukaan dan air tanah dangkal, pemukiman semakin padaat, dan masih terbatasnya jalur hijau.

Timbulnya gejala pendangkalan dan pergeseran nilai, baik nilai agama maupun nilai adat, sebagai eksekus sampingan kehidupan global serta munculnya heterogenitas suku dan ras serta berbagai kecenderungan dan kepentingan. Secara riil, gejala itu mengkristal dalam bentuk patologi sosial serta perilaku KKN.

Usaha-usaha yang berkaitan dengan proses produksi untuk peningkatan nilai tambah hasil produksi perkebunan dan kehutanan masih lemah. Kegiatan perekonomian masih berskala lokal dan kegiatan perdagangan masih terbatas.

Kelengkapan fasilitas sosial Kota Palopo sehubungan dengan perannya sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi masih belum mencukupi, terutama untuk pelayanan pendidikan tingkat lanjutan atas, reaksi terbuka serta fasilitas pelayanan sosial, ekonomi dan perdagangan grosir.

Kondisi fisik dasar hanya sebagian saja yang mampu menampung dan menunjang perkembangan kota, di samping sebagian lahan di sepanjang pinggiran sungai di pusat kota merupakan rawa-rawa.

Bentuk Kota Palopo yang cenderung mengalami pergeseran dari pola perkembangan konsentrasi menjadi pola linier berkembang mengikuti jalur trans Sulawesi. Kondisi ini kurang menguntungkan di dalam pelayanan fasilitas kota jika tidak ditunjang dengan jalan alternatif/jalan lingkungan yang masih terbatas.

Terjadinya pembauran fungsi penggunaan lahan seperti kegiatan industri di kawasan pelabuhan, pencampuran kegiatan perdagangan eceran dan grosir, kegiatan pendidikan bercampur dengan fasilitas hiburan (bioskop), serta perluasan pemukiman ke kawasan Amassangan dan Boting yang berawa-rawa dan selalu mengalami banjir rutin setiap musim hujan.

Pertambahan penduduk kota yang mencapai 2,5% petahun yang diikuti dengan peningkatan kegiatan penduduk yang menyebabkan bertambahnya beban kota dan menurunnya kualitas kota, seperti peningkatan volume sampah limbah industri rumah tangga yang mencemari lingkungan, penurunan kualitas air permukaan dan air tanah dangkal, pemukiman semakin padaat, dan masih terbatasnya jalur hijau.

Timbulnya gejala pendangkalan dan pergeseran nilai, baik nilai agama maupun nilai adat, sebagai ekses sampingan kehidupan global serta munculnya heterogenitas suku dan ras serta berbagai kecenderungan dan kepentingan. Secara riil, gejala itu mengkristal dalam bentuk patologi sosial serta perilaku KKN.

- Kelemahan yang berkaitan dengan realisasi dari program-program yang telah ada, baik program yang berkaitan dengan RTUK maupun program yang berkaitan dengan upaya khusus penanggulangan masalah-masalah sosial sehingga realisasi kedua program belum nampak. Orientasi sektoral nampaknya masih sangat mengemuka dalam program-program yang dicanangkan serta realisasinya.

### 3. *Opportunity (Peluang)*

Berbagai kelemahan yang diidentifikasi di atas merupakan hasil evaluasi terhadap potensi dan keberadaan dewasa ini yang dipandang sebagai kendala atau hambatan dalam pelaksanaan rencana pengembangan Kota Palopo secara menyeluruh ke depan. Menyadari akan kelemahan itu dan dengan bermodalkan kekuatan yang dimiliki seperti potensi sumber daya yang tersedia (*available resource*), diharapkan apa yang diidentifikasi sebagai kelemahan selama ini dapat memberikan peluang untuk menjadikannya sasaran prioritas penanganan.

Beberapa hal yang menjadi peluang Kota Palopo dalam melakukan perubahan dan pembangunan, adalah sebagai berikut:

- Pengembangan kegiatan industri pengelolaan hasil produksi perkebunan dan kehutanan di Kota Palopo. Upaya ini dapat memberi pengaruh ganda; meningkatkan kegiatan perekonomian dan perdagangan masyarakat serta dapat merangsang pengembangan transportasi dari dan ke wilayah pengaruh efektif kota atau ke wilayah yang lain.
- Upaya penambahan dan peningkatan pelayanan fasilitas sosial ekonomi akan meningkatkan aktivitas masyarakat sehari-hari dalam upaya lebih meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan dapat memberikan dampak positif bagi usaha pembangunan dan pengembangan kota.
- Dengan perbaikan sistem drainase dan konstruksi serta sistem pengelolaan sampah yang tepat merupakan suatu peluang kegiatan untuk mengatasi masalah kondisi fisik dasar Kota Palopo.
- Kecenderungan pergeseran pola perkembangan kota dari kosentris ke pola linear memberikan peluang untuk jalan-jalan alternatif atau jalan lingkungan.

- Terjadinya pembauran fungsi penggunaan lahan menuntut adanya upaya penataan penggunaan lahan kembali dengan mengindahkan prinsip tata ruang.
- Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun merupakan indikator meningkatnya kebutuhan masyarakat kota terhadap barang konsumsi yang diperlukan sehari-hari. Keadaan ini memberikan peluang obyek pemasaran bagi Kota Palopo. Manfaat obyek pemasaran tersebut adalah timbulnya sektor-sektor kegiatan kota, terutama kegiatan industri dengan jenis produksinya yang melayani konsumen lokal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kota dan memperluas tersedianya lapangan kerja. Adapun pertambahan beban kota yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dapat diatasi dengan program perbaikan kampung dan konsolidasi lahan perkotaan.
- Gejala pendangkalan dan pergeseran nilai adat dan agama yang secara nyata mengkristal dalam bentuk patologi sosial dan KKN, seyogyanya menyadarkan semua pihak yang merasa bertanggungjawab terhadap pembinaan kehidupan masyarakat untuk memikirkan dan merancang suatu upaya bersama yang lebih intensif mengatasi gejala tersebut.

#### **4. *Treath (Ancaman)***

Permasalahan yang dihadapi Kota Palopo sebagai suatu kota yang sedang berkembang seperti yang telah dikemukakan di atas, telah diupayakan untuk mengatasinya atau setidaknya meminimalisasinya melalui program penataan dan pembangunan kota yang dirancang dalam RTURK Kota Palopo dan melalui program BOP3S Kabupaten Luwu.

Namun demikian, dari informasi hasil wawancara dan penelusuran dokumen yang dilakukan selama penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal yang dapat menjadi ancaman bagi upaya penataan dan pengembangan Kota Palopo ke depan, apabila tidak ditangani dengan baik:

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (sekitar 2,5% pertahun) dapat menimbulkan akibat negatif berupa antara lain tersebarnya kelompok-kelompok pemukiman kumuh yang segregatif dan rawan penyakit sosial, perkelahian, perampokan, dan pencurian, di samping suasana pemukiman kumuh itu sendiri sangat mengganggu tata ruang suatu kota yang sementara tumbuh dan berkembang seperti halnya Kota Palopo.

Adanya oknum pejabat, aparat, dan pelaksana program yang bermental KKN, perilaku menyimpang tersebut yang merupakan warisan orde baru, tampaknya belum dapat dikikis habis pada era reformasi. Bila keadaan demikian berlangsung terus maka akan merupakan ancaman besar bagi keberlangsungan pembangunan Kota Palopo sebagaimana yang telah diprogramkan.

Adanya indikasi aparat kurang serius menangani kasus-kasus penyakit sosial yang keadaannya sangat memprihatinkan, bahkan terkadang ditemukan indikasi adanya oknum aparat yang melindungi peredaran penyakit-penyakit sosial yang dimaksud. Ancaman yang dapat ditimbulkan adalah munculnya rasa tidak percaya sebagaimana masyarakat terhadap kredibilitas aparat penegak hukum di lapangan dan rawannya timbul konflik sosial.

Adanya kelompok tertentu (dari penduduk pendatang) yang tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka yang berlatarbelakang primordialisme walaupun tidak sesuai dengan kebiasaan dan pola hidup penduduk asli yang mayoritas beragama Islam. Bila hal ini tidak berhasil dipecahkan melalui *win-win solution*, maka dikuatirkan akan menimbulkan konflik sosial dengan segala akibat yang tidak diharapkan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penataan pemukiman penduduk Kota Palopo, baik pada masa Kerajaan Luwu maupun pada masa kolonialisme Belanda cenderung menganut pola sentries (terpusat) dengan pengelompokan berdasarkan strata sosial. Dengan demikian pemisahan (segregasi) pemukiman tampaknya sejak awal telah dianut dalam penataan pemukiman Kota Palopo.

Perkembangan kota dan pemukiman di Palopo selama lima dasawarsa pasca kemerdekaan yang cenderung mengikuti keinginan masyarakat dan tuntutan urbanisasi, sementara belum ada suatu perencanaan umum tata kota yang baku untuk dijadikan acuan, pada gilirannya memunculkan segregasi pemukiman yang cenderung berpola: (1) pola segregasi etnis; (2) pola segregasi okupasi; (3) pola segregasi status sosial, dan (4) pola segregasi agama.

Keempat pola segregasi pemukiman yang diidentifikasi tersebut memberikan dampak bagi kehidupan penduduk kota, baik dampak lingkungan berupa rendahnya rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan maupun dampak sosial berupa berupa kesenjangan, keresahan, dan kerawanan sosial.

Program nyata dan terpadu untuk menangani masalah perkotaan, termasuk dampak segregasi pemukiman di Kota Palopo, telah dirintis Pemerintah Daerah pada pertengahan tahun 90-an melalui penyusunan RTURK (Rencana Tata Umum Ruang Kota) Palopo. Akan tetapi realisasi RTURK mengalami hambatan sebagai dampak krisis nasional dan regional serta perubahan-perubahan yang terjadi secara internal di daerah Luwu pasca orde baru. Sementara itu, program nyata dan terpadu dari semua pihak berkompeten utnuk menanggulangi patologi sosial, tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Beberapa masalah internal tampaknya menjadi penghambat realisasi program yang telah dicanangkan. Namun demikian, penanganan masalah-masalah yang timbul selama ini tetap dilakukan secara sektoral dan fungsional.

## **B. Saran**

Analisis evaluasi di atas menggambarkan suatu strategi penanganan perkembangan dan pembangunan Kota Palopo ke depan. Kelemahan-kelemahan yang ada, baik yang bersifat fisik, alami dan buatan, maupun yang bersifat sosial, demikian pula hal-hal yang diprediksi sebagai ancaman, pada dasarnya merupakan tantangan yang harus mendapatkan peluang penanganan yang sungguh-sungguh dengan skala prioritas. Segala sumber daya yang dimiliki, baik yang masih berbentuk potensi maupun yang telah diwujudkan dalam bentuk 5's M (*man, material, machine, money, and method*) hendaknya didayagunakan sebaik mungkin. Upaya penanganan dituangkan dalam suatu program kerja yang terarah, sistematis, bertahap, berkesinambungan, serta tidak muluk-muluk. Keterpaduan juga merupakan salah satu unsur strategis penting yang perlu diindahkan dalam penanganan perkembangan dan pembangunan kota.

Apabila mekanisme demikian telah ditempuh namun realisasinya masih mengalami hambatan atau stagnasi maka perlu dilakukan evaluasi faktor penyebab atau apa kendalanya, kemudian melakukan tindakan perbaikan.

Adanya oknum pejabat, aparat, dan pelaksana program yang bermental KKN, perilaku menyimpang tersebut yang merupakan warisan orde baru, tampaknya belum dapat dikikis habis pada era reformasi. Bila keadaan demikian berlangsung terus maka akan merupakan ancaman besar bagi keberlangsungan pembangunan Kota Palopo sebagaimana yang telah diprogramkan.

Adanya indikasi aparat kurang serius menangani kasus-kasus penyakit sosial yang keadaannya sangat memprihatinkan, bahkan terkadang ditemukan indikasi adanya oknum aparat yang melindungi peredaran penyakit-penyakit sosial yang dimaksud. Ancaman yang dapat ditimbulkan adalah munculnya rasa tidak percaya sebagian masyarakat terhadap kredibilitas aparat penegak hukum di lapangan dan rawannya timbul konflik sosial.

Adanya kelompok tertentu (dari penduduk pendatang) yang tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka yang berlatarbelakang primordialisme walaupun tidak sesuai dengan kebiasaan dan pola hidup penduduk asli yang mayoritas beragama Islam. Bila hal ini tidak berhasil dipecahkan melalui *win-win solution*, maka dikuatirkan akan menimbulkan konflik sosial dengan segala akibat yang tidak diharapkan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penataan pemukiman penduduk Kota Palopo, baik pada masa Kerajaan Luwu maupun pada masa kolonialisme Belanda cenderung menganut pola sentries (terpusat) dengan pengelompokan berdasarkan strata sosial. Dengan demikian pemisahan (segregasi) pemukiman tampaknya sejak awal telah dianut dalam penataan pemukiman Kota Palopo.

Perkembangan kota dan pemukiman di Palopo selama lima dasawarsa pasca kemerdekaan yang cenderung mengikuti keinginan masyarakat dan tuntutan urbanisasi, sementara belum ada suatu perencanaan umum tata kota yang baku untuk dijadikan acuan, pada gilirannya memunculkan segregasi pemukiman yang cenderung berpola: (1) pola segregasi etnis; (2) pola segregasi okupasi; (3) pola segregasi status sosial, dan (4) pola segregasi agama.

Keempat pola segregasi pemukiman yang diidentifikasi tersebut memberikan dampak bagi kehidupan penduduk kota, baik dampak lingkungan berupa rendahnya rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan maupun dampak sosial berupa kesenjangan, keresahan, dan kerawanan sosial.

Program nyata dan terpadu untuk menangani masalah perkotaan, termasuk dampak segregasi pemukiman di Kota Palopo, telah dirintis Pemerintah Daerah pada pertengahan tahun 90-an melalui penyusunan RTURK (Rencana Tata Umum Ruang Kota) Palopo. Akan tetapi realisasi RTURK mengalami hambatan sebagai dampak krisis nasional dan regional serta perubahan-perubahan yang terjadi secara internal di daerah Luwu pasca orde baru. Sementara itu, program nyata dan terpadu dari semua pihak berkompeten untuk menanggulangi patologi sosial, tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Beberapa masalah internal tampaknya menjadi penghambat realisasi program yang telah dicanangkan. Namun demikian, penanganan masalah-masalah yang timbul selama ini tetap dilakukan secara sektoral dan fungsional.

## **B. Saran**

Analisis evaluasi di atas menggambarkan suatu strategi penanganan perkembangan dan pembangunan Kota Palopo ke depan. Kelemahan-kelemahan yang ada, baik yang bersifat fisik, alami dan buatan, maupun yang bersifat sosial, demikian pula hal-hal yang diprediksi sebagai ancaman, pada dasarnya merupakan tantangan yang harus mendapatkan peluang penanganan yang sungguh-sungguh dengan skala prioritas. Segala sumber daya yang dimiliki, baik yang masih berbentuk potensi maupun yang telah diwujudkan dalam bentuk 5's M (*man, material, machine, money, and method*) hendaknya didayagunakan sebaik mungkin. Upaya penanganan dituangkan dalam suatu program kerja yang terarah, sistematis, bertahap, berkesinambungan, serta tidak muluk-muluk. Keterpaduan juga merupakan salah satu unsur strategis penting yang perlu diindahkan dalam penanganan perkembangan dan pembangunan kota.

Apabila mekanisme demikian telah ditempuh namun realisasinya masih mengalami hambatan atau stagnasi maka perlu dilakukan evaluasi faktor penyebab atau apa kendalanya, kemudian melakukan tindakan perbaikan.

Hal yang tidak kurang pentingnya adalah upaya atau program yang dicanangkan harus memiliki dasar pijakan atau dasar hukum yang kuat misalnya dalam bentuk peraturan daerah (Perda).

## **DAFTARPUSTAKA**

- I Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu/Polopo, 2002, *Kota Palopo dalam Angka 2002*, Palopo: Kerjasama Pemkot Palopo dengan BPS Kab. Luwu/Polopo.
- Bachtiar, Harsya W, dkk., 1988. *Masyarakat dan Kabudayaan*, Jakarta: Djambatan.
- Basri, P dan Rukmini, 1979. Biografi Pahlawan Andi Jemma datu Luwu, Ujungpandang; Pemda Sulsel.
- Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Dirjen Cipta karya Dep. Pekerjaan Umum, 1995. *Penyiapan Pembangunan Prasarana Kota Palopo, Laporan Intern II Palopo*, Ujungpandang: Proyek Penataan Sistem Prasarana Perkotaan dan Kawasan Fungsional Bagian Proyek Penyusunan Rencana Kota dan Kawasan Sulsel.
- Ever, Hans Dieter, 1986, *Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: LP3ES.
- Koentjaraningrat, 1982, Migrasi, Transmigrasi dan Urbanisasi dalam Koentjaraningrat (E.d), *Masalah-masalah Pembangunan, Bunga Rampai Antropologi Terapan*, Jakrata: LP3ES.
- Mattata, Sanusi Daeng, 1967, *Luwu dalam Revolusi*, Makassar: Bhakti baru.
- Morris, D.F.Van Braam, 1988, *Kerajaan Luwu* (Terjemahan H.A.M. Mappasanda; 1993), Ujungpandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Dep. Pendidikan dan Kebudayaan.
- Paul Johnson, Doyle, 1990, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Pelly, Usman. 1988. *Segregasi Kehidupan Pemukiman di Perkotaan dan Sebuah Alternatif*, dalam Harsya Bachtiar W dkk "Masyarakat dan Kebudayaan". Jakarta: Djambatan.
- Pemda Tk.II Luwu, 1994. *Rencana Umum Tata Ruang Kotif Palopo*, Palopo: Pemda Tk.II Luwu.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Potensi dan Daya Tarik Wisata Bumi Sawerigading Luwu*, Palopo: Dinas Pariwisata Kab. Luwu.
- Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Dep. Agama RI., 2003, *Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Dep. Agama RI.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Seri II Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Dep. Agama RI.
- Sarita, Pawiloy, 2000. *Sejarah Luwu*, Makassar: Fakultas Sosial Universitas Negeri Makassar.
- Seokanto, Seorjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: rajawali Pers.
- Tim Penanggulangan Patologi Sosial (TP2S) Kabupaten Luwu, 2001, *Buku Panduan Tim Penanggulangan Patologi Sosial Kabupaten Luwu*, Palopo, TP2S.